



Analisis Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan

Ayu Auliyah¹, Samirah Dunakhir^{2*}

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar

Article History

Received Juli 20, 2022

Approved September 12, 2022

Published Desember 07, 2022

Keywords

*Siskeudes Application and Village
Financial Management*

JEL Clasification

M40

How to Cite

Ayu Auliyah, Samirah Dunakhir (2022). Analisis Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(2), 327-334

Abstract

This study aims to determine how well the use of the Siskeudes Application in Financial Management in Belapunranga Village, Kec. Parangloe Kab. Gowa, South Sulawesi. The variable in this study is the use of the Siskeudes Application in Financial Management as measured by Permendagri Number 20 of 2018 concerning Financial Management. The population of this research is Financial Management in Belapunranga Village, Kec. Parangloe Kab. Gowa, South Sulawesi, while the sample in this study used Financial Management Results for the 2021 Fiscal Year. Data collection was carried out using documentation, while the data analysis technique used was descriptive analysis using a rough conformity index measurement. The results showed that the overall use of the Siskeudes Application in Financial Management with 5 indicators namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability can still be said to be quite appropriate/good enough with a percentage of 73% from 100%.

*Samirah Dunakhir

Jl. Raya Pendidikan Kampus Universitas Negeri Makassar

Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

e-mail: samirah.dunakhir@unm.ac.id

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, tata kelola keuangan perlu dikembangkan untuk menghasilkan pembangunan yang bertanggungjawab. Dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia dibutuhkan sebuah organisasi pemerintahan desa yang tangguh serta tata



kelola desa yang tepat. Karena pada dasarnya, kewenangan yang diberikan kepada desa saat ini adalah amanat masyarakat desa yang tercatat sebagai mandat dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa untuk dapat membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat desa secara mandiri. (Raharjo, 2021:4).

UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Semua itu terangkum dalam suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa sedangkan rencana keuangan tahun pemerintahan desa dituangkan dalam APBDesa. Dalam siklus tersebut, mencakup pelaksanaan dari wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki oleh desa, sehingga dalam praktiknya, aparatur pemerintah desa dituntut untuk dapat memahami dan mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Suprpto, 2021:10-12).

Berikut merupakan tabel Alokasi Dana Desa Belapunranga untuk tahun anggaran 2016-2018:

Tabel 1 Alokasi Dana Desa Desa Belapunranga TA 2016-2018

Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)
2016	Rp607.025.555,00
2017	Rp696.544.322,00
2018	Rp696.031.552,00

Sumber: Bendahara Desa Belapunranga, 2022

Berdasarkan data Alokasi Dana Desa Belapunranga periode 2016-2018, dapat dilihat bahwa alokasi dana desa mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Dan pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,1%. Pemberian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Menurut Kaur Keuangan Desa Belapunranga yang menjadi sebab penurunan dan kenaikan ADD yaitu luas wilayah, jumlah penduduk dan jenis desa apakah desa maju atau desa berkembang. Dengan adanya pemberian Dana Desa menuntut desa untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam membuat laporan keuangan terkadang aparatur desa menghadapi masalah dalam hal ketepatan waktu. Sehingga laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diagendakan. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, Badan



Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan suatu aplikasi pengelolaan keuangan yakni Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes bertujuan untuk memudahkan aparatur desa dalam hal pengelolaan keuangan baik pada tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Kelebihan Aplikasi Siskeudes yaitu memudahkan tata kelola keuangan desa serta didesain secara sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan aparat desa dan masyarakat untuk mengakses aplikasi ini.

Desa Belapunranga merupakan salah satu desa dari 121 desa di Kabupaten Gowa yang menerapkan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan. Sebelum adanya Aplikasi Siskeudes dalam hal pengelolaan keuangan dikerjakan dengan menggunakan Aplikasi *Microsoft Excel*.

Dalam penggunaan aplikasi harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar berjalan dengan baik. Permasalahan yang ada setelah adanya Aplikasi Siskeudes yaitu mengenai SDM yang ada di Desa Belapunranga. Kurangnya pemahaman aparatur desa dalam penggunaan Aplikasi mengakibatkan penggunaan yang kurang maksimal. Masalah lain yang dihadapi yaitu terkait jaringan internet yang kurang stabil, sehingga berdampak pada keefektifitasan dalam mengakses Aplikasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan kajian ini yaitu untuk mengetahui seberapa baik Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala dengan apa adanya. Penelitian mengenai Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu dokumen tentang Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Belapunranga.

Variabel dalam penelitian ini adalah Aplikasi Siskeudes (X), dan Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Data yang dibutuhkan antara lain APB Desa, RKP Desa, Rekening Koran, Buku Kas Umum, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Laporan APB Desa Semester Pertama, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa, *Screen Shot* Aplikasi Siskeudes.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kompetitif. Metode analisis deskriptif kompetitif yaitu mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan dengan membandingkan kesesuaian



indikator penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun kriteria yang digunakan yaitu berdasarkan nilai Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Arikunto (2010) yaitu dengan rumus berikut:

$$IKK = \frac{n}{N}$$

Keterangan :

IKK = Indeks Kesesuaian Kasar

N = Jumlah Kode atau Jawaban yang sama

N = Banyaknya objek yang diamati

Kesesuaian hasil perhitungan IKK dibuat dalam bentuk persentasi lalu dihitung rata-ratanya untuk mengetahui besarnya kesesuaian yang diperoleh dengan cara:

$$\text{Kesesuaian} = IKK \times 100\%$$

Selanjutnya persentase tersebut ditafsirkan dengan kalimat kuantitatif. "Terkadang pencairan dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat kuantitatif" (Arikunto, 2010).

HASIL DAN DISKUSI

Pada penelitian ini, peneliti mengukur variabel penggunaan Aplikasi Siskeudes menggunakan Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil yang ditemukan bahwa penggunaan Aplikasi Siskeudes Desa Belapunranga dalam Pengelolaan Keuangan mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah mencapai 100% namun pada tahap perencanaan masih mencapai 25% yang dikualifikasikan tidak sesuai. Dan pada tahap pelaksanaan mencapai 67% yang dikualifikasikan cukup sesuai. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Belapunranga dapat dikatakan cukup sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dimana Pengelolaan Keuangan dilaksanakan beberapa tahap diantaranya:

1. Tahap Perencanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa terkait rancangan APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD melalui musyawarah BPD. Rancangan APB Desa Belapunrangan dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 Desember 2020 bertempat di Aula Pertemuan Kantor Desa Belapunranga yang dihadiri oleh Aparat Desa, anggota BPD dan Tokoh Masyarakat.



Hasil dari kesepakatan bersama tersebut lalu diinput oleh Operator Aplikasi Siskeudes kedalam menu perencanaan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil dokumentasi terhadap dokumen lampiran 5, 6, dan 7. Namun terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat dibuktikan dan melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri. Maka pada tahapan perencanaan dikatakan tidak sesuai.

2. Tahap Pelaksanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati. Desa Belapunranga memiliki Buku Tabungan sendiri yang telah disetujui oleh Bupati/Wali Kota atas nama Desa Belapunranga Kec. Parangloe. Kaur dan Kasi Desa Belapunranga menyampaikan laporan akhir realisasi kepada Kepala Desa pada tanggal 10 Januari 2022.

Berkas-berkas tersebut lalu di input oleh Operator Aplikasi Siskeudes kedalam menu penganggaran. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumentasi terhadap dokumen lampiran 8, 9, dan 10. Namun waktu pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri. Maka pada tahapan pelaksanaan dapat dikatakan cukup sesuai.

3. Tahap Penatausahaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur Keuangan Desa Belapunranga mencatat segala penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada Sekretaris Desa. Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum pada tanggal 30 Oktober 2021 yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa Belapunranga.

Berkas-berkas tersebut lalu diinput oleh Operator Aplikasi Siskeudes dalam menu penatausahaan. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumentasi terhadap dokumen lampiran 11 dan 12. Maka tahapan penatausahaan dapat dikatakan sesuai.

4. Tahap Pelaporan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Kepala Desa Belapunranga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama tahun anggaran 2021 pada tanggal 9 Juli 2021 kepada Bupati melalui Camat.

Lalu Operator Aplikasi Siskeudes menginput data pelaporan dalam menu pelaporan. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumentasi terhadap dokumen lampiran 13 dan 14. Maka tahapan penatausahaan dapat dikatakan sesuai.



5. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa Belapunranga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati melalui Camat pada hari Senin, 7 Februari 2022. Lalu laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang terpajang di depan Kantor Desa Belapunranga.

Laporan pertanggungjawaban ini juga dapat diakses oleh Operator Aplikasi Siskeudes dalam Aplikasi. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumentasi terhadap dokumen lampiran 15, 16, dan 14. Maka tahapan pertanggungjawaban dapat dikatakan sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan, maka ditarik kesimpulan bahwa Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Belapunranga cukup sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walaupun pada tahapan perencanaan dikatakan tidak sesuai, namun jika ditarik kesimpulan secara keseluruhan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan dengan 5 indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih dapat dikatakan cukup sesuai/cukup baik dengan persentase 73% dari 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, & Utomo Nur Mohammad. (2017). Kajian strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Tarakan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen 1 (3)* 99-118. <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/55>.
- Databoks. (2017). Pengguna Ponsel Indonesia Mencapai 142% dari Populasi. (Diakses pada 24 Januari 2021 pada pukul 12.12 WITA) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi>
- Dedi Purwana ES, Rahmi, S. A. (2017). *Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*. 1(1), 1–17.
- Elida Tety dan Ari Raharjo. 2019. *Pemasaran Digital*. Bogor: IPB Press.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). *Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean*.



- JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76.
<https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>.
- Firdaus Agung Nurdiansyah (2017). *Micro, Small and Medium Enterprise Development Strategy In Power Economic Development (Case Study on Maros Bread Enterprise in Maros District)*. 19(2), 114–120.
- Harto, D., Pratiwi, S. R., Utomo, M. N., & Rahmawati, M. (2019). Penerapan Internet Marketing Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada UMKM. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 39.
<https://doi.org/10.30595/jppm.v3i1.3033>.
- Hartopo Agustinus. 2019. *Analisis Pendapatan Petani Sagu Di Kampung Simpuro Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura Papua*. Tangerang: Indocamp
- Hasan, M. (2020). Literasi dan Perilaku Ekonomi: Transfer Pengetahuan Kewirausahaan dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi Informal. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Hasan, M., Musa, C. I., Arismunandar, A., Tahir, T., & Azis, M. (2019). Entrepreneurship Education, Family Capital, and Family Business Performance in Makassar, South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Scientific Development and Research (IJS DR)*, 4(6), 269-272.
- Hasan, M., Musa, C. I., Azis, M., & Tahir, T. (2020). Positive psychological capital, market orientation, and business performance of family business in the culinary sector: A research study. *Economics & Sociology*, 13(3), 97-112.
- Helmalia, H., & Afrinawati, A. (2018). Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Padang. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 237. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.182>
- Hendratni, T. W. (2021). Pelatihan Digital Marketing sebagai upaya peningkatan Pendapatan Bagi UMKM di kabupaten MBS. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan ...*, 3, 59–66. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v3i2.348>
- Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB). (Diakses pada 23 Januari 2021 pada pukul 11.35 WITA) <http://www.depkop.go.id/data-umkm>
- Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kedua Belas, Jakarta: Erlangga
- Kusuma, J., No, B., Pekalongan, K., & Tengah, J. (2020). *Di Tengah Dampak Covid-19*.
- Kusuma, J., No, B., Pekalongan, K., & Tengah, J. (2020). *Di Tengah Dampak Covid-19*.
- Munarfah, A., & Hasan, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Praktika Aksara Semesta.
- Nandan Limakrisan dan Togi Parullian Purba. 2019. *Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi dalam Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.



- Pradiani, T. (2018). Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 46–53. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.45>
- Putra, A. H. (2016). *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*.
- Rakib, M., Syam, A., Marhawati, M., & Dewantara, H. (2020). Pelatihan Merancang Bisnis Online di Masa Pandemi bagi Mahasiswa. *Dedikasi*, 22(2), 129–134. <https://doi.org/10.26858/dedikasi.v22i2.16121>
- Rufaida, N. (2019). Analisis Pengaruh Pemasaran Digital (Digital Marketing) Terhadap Brand Awareness Pada E-Commerce. *E-Proceeding of Management*; 6(2), 2091. <https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/9529/9399>
- Sa'ad, W. N. (2017). *Pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan sentra industri keripik pisang bandar lampung ditinjau dari etika bisnis islam*.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa Msmes the Pillar for Economy. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146.
- Sarma Ma'mun. 2019. *Entrepreneurial Marketing untuk Keberhasilan Pemasaran Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Edisi Revisi*. Bogor: IPB Press.
- Sulaksono, J. (2020). Peranan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Desa Tales Kabupaten Kediri. *Generation Journal*, 4(1), 41–47. <https://doi.org/10.29407/gj.v4i1.13906>
- Sulaksono, J. (2020). Peranan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Desa Tales Kabupaten Kediri. *Generation Journal*, 4(1), 41–47. <https://doi.org/10.29407/gj.v4i1.13906>
- Triatmanto, B., Abwar, S., & Aris, S. (2018). *Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (tik) pada usaha mikro, kecil dan menengah (umkm)*. 2(3), 53–60.
- Widodo, 2019. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Rajagrafindo Persada.